



Islamic Education Curriculum Reform as a Pathway to Muslim Nationalism in Germany

Heldi Firma¹, Helmiati², Muhammad Nazir³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: heldigaul5@gmail.com¹, helmiati@uin-suska.ac.id², m.nazir@uin-suska.ac.id³

ABSTRACT

This paper examines how the reform of the Islamic education curriculum in Germany serves as an effort to strengthen Muslim nationalism within the context of a pluralistic and secular German society. Using a qualitative descriptive method through a literature study, this research analyzes curriculum policies. The findings show that curriculum reform includes integrating inclusive Islamic teachings, national values, and interfaith dialogue into the Islamic education curriculum. These reform efforts contribute significantly to the development of Muslim nationalism in Germany. The implications of Islamic Religious Education in Germany include improved learning outcomes and significant changes in the teaching and learning system in schools. These reforms also call for changes in the legal framework to ensure and regulate the implementation of a nationally consistent Islamic Religious Education system in the country.

Keywords: Islamic Education, Curriculum Reform, Muslim Nationalism, Germany, Integration

PENDAHULUAN

Muslim di Jerman merupakan komunitas yang sangat heterogen. Mereka berasal dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan negara asal, dengan kelompok terbesar adalah keturunan imigran Turki, disusul oleh Muslim dari negara-negara Arab, Balkan, Asia Selatan, dan Afrika Utara (Pew Research Center, 2017). Keberagaman ini menjadikan umat Islam di Jerman bukan satu kelompok yang homogen, tetapi terdiri dari identitas yang beragam dan saling beririsan. Hal ini memengaruhi bagaimana nilai-nilai Islam dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari serta dalam konteks pendidikan.

Keragaman etnis ini menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan identitas kolektif sebagai Muslim Jerman. Banyak dari mereka masih merasa terpisah secara sosial maupun politik dari identitas nasional Jerman. Di sinilah muncul persoalan integrasi, khususnya bagaimana generasi muda Muslim dapat tumbuh sebagai warga negara Jerman yang bangga dengan identitas keislaman mereka tanpa merasa dikucilkan dari narasi kebangsaan.



Pemerintah Jerman selama dua dekade terakhir menunjukkan kekhawatiran terhadap integrasi komunitas Muslim, terutama dalam konteks keamanan dan pencegahan radikalisasi. Meskipun sebagian besar Muslim di Jerman menjalani kehidupan damai dan aktif secara sosial, beberapa kasus radikalisasi dan ketegangan antarbudaya telah mendorong negara untuk mencari solusi sistemik. Pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam, dilihat sebagai instrumen penting dalam membangun jembatan antara identitas religius dan loyalitas kewarganegaraan (Rohe, 2021).

Penekanan negara pada integrasi ini bukan hanya menyasar penguasaan bahasa dan keterampilan sosial, tetapi juga menyentuh aspek identitas dan nilai. Pendidikan agama Islam yang dikembangkan di sekolah negeri diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai universal seperti toleransi, demokrasi, dan hak asasi manusia kepada siswa Muslim sejak dini (Kiefer & Kühn, 2019).

Meskipun Jerman adalah negara sekuler, sistem pendidikan Jerman secara konstitusional memberikan ruang bagi pelajaran agama di sekolah publik (Grundgesetz Art. 7 Abs. 3). Pendidikan agama di Jerman bersifat konfesional tetapi harus berada dalam kerangka nilai-nilai negara demokratis. Artinya, agama diajarkan tidak untuk memisahkan, tetapi untuk mendidik dalam konteks warga negara yang hidup dalam masyarakat plural (Karakaşoğlu & Mecheril, 2018).

Karena itu, pendidikan Islam yang diintegrasikan ke dalam sistem sekolah negeri bukan semata-mata pengakuan terhadap keberadaan Islam, melainkan bagian dari strategi negara dalam memastikan bahwa umat Islam mendapatkan pendidikan keagamaan yang terstandar, moderat, dan kompatibel dengan nilai-nilai demokratis.

Hingga awal 2000-an, pendidikan Islam di Jerman kebanyakan diselenggarakan secara informal oleh komunitas Muslim sendiri, dengan kurikulum dan metode yang tidak diawasi negara. Banyak dari lembaga pendidikan tersebut mengimpor materi ajar dan guru dari negara asal imigran, seperti Turki atau Arab Saudi, yang seringkali tidak selaras dengan realitas kehidupan Muslim di Jerman (Schiffauer, 2013).

Sejak 2012, beberapa negara bagian di Jerman mulai merumuskan kurikulum pendidikan Islam yang resmi dan diajarkan di sekolah-sekolah negeri. Universitas-universitas seperti Universitas Münster, Universitas Osnabrück, dan Universitas Frankfurt menjadi pionir dalam mendidik guru agama Islam melalui program akademik yang diakui negara (Kiefer & Kühn, 2019). Kurikulum ini mencakup tema-tema seperti tafsir, fikih, sejarah Islam, serta nilai-nilai etika Islam dalam masyarakat plural.

Namun demikian, kurikulum ini masih terus mengalami perbaikan dan reformasi. Tantangan utamanya adalah bagaimana menjadikan pendidikan Islam sebagai sarana pembangunan identitas Muslim Jerman yang konstruktif, nasionalis, dan terbuka terhadap kebinekaan. Dengan kata lain, pendidikan Islam tidak hanya mendidik tentang agama, tetapi juga tentang bagaimana menjadi warga negara Jerman yang aktif, loyal, dan berkontribusi terhadap masyarakat.

Sejumlah studi telah membahas pendidikan Islam di Jerman dari sudut pandang integrasi dan pedagogi (Karakaşoğlu & Mecheril, 2018; Schiffauer, 2013). Namun, belum banyak penelitian yang secara eksplisit membahas bagaimana reformasi kurikulum pendidikan Islam dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasionalisme Muslim di Jerman. Nasionalisme dalam konteks ini bukan berarti chauvinisme atau eksklusivisme etnis, melainkan nasionalisme kewargaan yang menjadikan nilai-nilai konstitusional Jerman sebagai dasar kesatuan sosial.

Dengan mengisi celah ini, penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang melihat pendidikan Islam bukan hanya sebagai alat integrasi sosial, tetapi juga sebagai medium pembentukan identitas kebangsaan yang koheren dengan identitas keislaman.

Penelitian ini bertujuan untuk: Menganalisis dinamika reformasi kurikulum pendidikan Islam di sekolah-sekolah publik Jerman. Mengkaji kontribusi kurikulum tersebut terhadap pembentukan nasionalisme Muslim yang inklusif. Mengidentifikasi tantangan pedagogis, ideologis, dan politis dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menjembatani ketegangan antara identitas keagamaan dan identitas nasional. Tanpa pendekatan pendidikan yang tepat, ada risiko meningkatnya eksklusi sosial, ghettoisasi, dan bahkan radikalisme. Sebaliknya, pendidikan Islam yang direformasi secara kontekstual mampu memperkuat rasa memiliki umat Islam terhadap bangsa Jerman, sekaligus memperkaya narasi kebangsaan Jerman yang pluralistik dan demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan pendidikan Jerman, dan dokumen resmi pemerintah. Analisis dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam di Jerman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Jerman

Pendidikan Islam formal di Jerman tidak dapat dipisahkan dari sejarah gelombang migrasi besar pekerja Turki (Gastarbeiter) pada dekade 1960-an dan 1970-an. Kedatangan jutaan pekerja migran tersebut ke Jerman Barat menandai titik awal berkembangnya komunitas Muslim yang signifikan secara demografis (Cesari, 2013). Seiring meningkatnya jumlah anak-anak Muslim generasi kedua dan ketiga, kebutuhan akan pendidikan agama yang terstruktur pun menjadi sangat mendesak. Namun, pada masa itu, fasilitas pendidikan Islam yang ada masih bersifat informal, terbatas pada madrasah komunitas, kelas agama di masjid, dan sekolah yang sebagian besar dikelola oleh organisasi keagamaan asal Turki seperti DITIB (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) (Schiffauer, 2013).

Kendati demikian, sekolah-sekolah informal tersebut tidak mendapatkan pengakuan resmi dari sistem pendidikan nasional Jerman. Kurikulum yang diajarkan pun umumnya belum disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai demokratis Jerman, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya segregasi sosial dan minimnya integrasi generasi muda Muslim ke dalam masyarakat Jerman yang lebih luas (Kiefer & Kühn, 2019).

Pengakuan formal atas pendidikan Islam di Jerman baru mulai tercapai pada awal abad ke-21. Keputusan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman menegaskan bahwa pendidikan agama Islam memiliki hak yang setara dengan pendidikan agama Kristen dan Katolik yang telah lebih dulu terintegrasi dalam sekolah negeri (Rohe, 2021). Putusan ini menjadi titik balik penting yang mendorong pemerintah dan negara bagian untuk mengembangkan pendidikan Islam secara terstruktur sebagai bagian dari kebijakan integrasi nasional sekaligus untuk meminimalisir pengaruh kelompok ekstremis di kalangan Muslim (Karakaşoğlu & Mecheril, 2018).



Sejak tahun 2010, beberapa universitas terkemuka di Jerman, seperti Universitas Münster, Osnabrück, Frankfurt, dan Tübingen, mulai mendirikan fakultas atau pusat studi teologi Islam. Institusi akademik ini tidak hanya berfokus pada pengajaran ilmu keislaman yang berbasis akademik, tetapi juga berperan sebagai pusat pelatihan guru agama Islam yang mampu menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan konteks sosial-politik dan sistem pendidikan Jerman yang pluralistik (El-Menouar, 2016). Perkembangan ini menandai transformasi pendidikan Islam dari ranah komunitas imigran ke dalam struktur pendidikan nasional yang diakui secara resmi dan inklusif.

Dengan integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan formal, Islam tidak lagi dianggap sebagai fenomena asing atau terpisah, tetapi menjadi bagian dari narasi integrasi nasional, pluralisme agama, dan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi Jerman (Spielhaus, 2017). Pendidikan Islam kini diposisikan sebagai sarana untuk membangun identitas Muslim yang harmonis dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan nasionalisme inklusif di Jerman.

A. Integrasi Ajaran Islam Inklusif ke dalam Kurikulum PAI

Reformasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jerman menekankan pentingnya integrasi ajaran Islam yang inklusif dan kontekstual, yang mampu merangkul keragaman komunitas Muslim di negara tersebut (Karakasoğlu & Mecheril, 2018). Ajaran Islam yang diajarkan tidak hanya fokus pada aspek ritual dan dogmatik, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai universal seperti keadilan ('adl), toleransi (tasamuh), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah). Pendekatan ini membantu mengikis pandangan sektarian yang kerap muncul dari pengajaran agama yang kaku, sekaligus memperkuat kohesi sosial di antara pelajar Muslim yang berasal dari latar belakang etnis berbeda, seperti Turki, Arab, dan Bosnia (El-Menouar, 2016).

Kurikulum yang inklusif ini dirancang agar relevan dengan konteks kehidupan Muslim di masyarakat pluralistik Jerman, membekali pelajar dengan keterampilan berpikir kritis dan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan serta penghormatan terhadap perbedaan. Melalui pendidikan yang berorientasi inklusif, generasi muda Muslim didorong untuk melihat identitas keagamaan mereka sebagai bagian dari identitas nasional yang lebih luas, bukan sebagai identitas yang terisolasi atau bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia di Jerman (Rohe, 2021).

B. Integrasi Nilai-nilai Kebangsaan ke dalam Kurikulum PAI

Selain nilai-nilai Islam yang inklusif, reformasi kurikulum PAI di Jerman secara eksplisit memasukkan nilai-nilai kebangsaan dan prinsip-prinsip dasar konstitusi Jerman seperti demokrasi, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan toleransi beragama (Schiffauer, 2013). Integrasi nilai-nilai kebangsaan ini bertujuan membentuk rasa nasionalisme inklusif di kalangan pelajar Muslim—sebuah konsep di mana identitas keislaman dan kewarganegaraan Jerman dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Pentingnya nilai kebangsaan dalam kurikulum juga merespon kekhawatiran pemerintah akan potensi segregasi sosial dan radikalisasi di kalangan generasi muda Muslim. Dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yang moderat, pelajar didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis dan sosial di Jerman, mengembangkan loyalitas ganda (doppelte Loyalität) yang memungkinkan mereka menjadi warga negara yang beriman sekaligus berkontribusi pada pembangunan bangsa (Kiefer & Kühn, 2019). Konsep loyalitas ganda ini juga mengoreksi dikotomi lama

yang menganggap bahwa Islam dan kewarganegaraan Barat selalu bertentangan (Karakaşoğlu & Mecheril, 2018).

C. Penguatan Kompetensi Guru dalam Melaksanakan Kurikulum Reformasi

Keberhasilan reformasi kurikulum PAI sangat bergantung pada kualitas tenaga pengajar agama Islam di sekolah negeri. Oleh karena itu, negara bagian seperti Nordrhein-Westfalen (NRW) dan Niedersachsen secara aktif mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi guru yang tidak hanya mengajarkan materi keislaman secara akademik, tetapi juga keterampilan pedagogis dan sensitivitas terhadap konteks sosial Jerman (Schiffauer, 2013).

Pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia, serta bagaimana menyampaikan ajaran Islam secara inklusif dan kontekstual kepada siswa. Guru diharapkan tidak hanya menjadi penyampai ilmu agama, tetapi juga agen integrasi yang menjembatani identitas keislaman dengan kewarganegaraan Jerman. Hal ini sangat penting mengingat kompleksitas latar belakang etnis dan sosial pelajar Muslim yang ada di Jerman (Rohe, 2021).

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait keberagaman pandangan di kalangan komunitas Muslim dan perbedaan standar pelatihan antar negara bagian. Upaya kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan organisasi Islam menjadi kunci untuk menghasilkan guru yang kredibel dan mampu menjalankan peran tersebut secara optimal (Karakaşoğlu & Mecheril, 2018).

D. Tantangan dan Strategi Implementasi Kurikulum PAI Reformasi

Meskipun reformasi kurikulum PAI menunjukkan kemajuan signifikan, pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan struktural dan sosial. Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi komunitas Muslim yang terdiri dari berbagai etnis, bahasa, dan afiliasi ideologis, yang menyulitkan pembentukan konsensus kurikulum yang diterima secara luas (El-Menouar, 2016). Konflik kepentingan antara kelompok konservatif yang menginginkan pengajaran ajaran Islam tradisional dan pemerintah yang mengutamakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia menimbulkan dinamika yang kompleks (Schiffauer, 2013).

Selain itu, standar pendidikan Islam yang belum seragam di seluruh negara bagian menimbulkan disparitas dalam kualitas pengajaran dan pelatihan guru. Untuk itu, kerjasama lintas sektor antara pemerintah negara bagian, akademisi, dan organisasi Islam terus diintensifkan sebagai strategi mengharmonisasikan kurikulum dan pelatihan guru di seluruh Jerman (Kiefer & Kühn, 2019).

Strategi lain yang diterapkan adalah meningkatkan keterlibatan komunitas Muslim dalam proses perancangan dan evaluasi kurikulum, agar kurikulum memiliki legitimasi sosial dan teologis di mata umat Islam sendiri (Karakaşoğlu & Mecheril, 2018). Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat mengurangi resistensi dan mempromosikan penerimaan yang lebih luas, sehingga pendidikan Islam tidak hanya menjadi alat integrasi, tetapi juga wahana penguatan identitas nasionalis Muslim di Jerman.

Salah satu tantangan paling signifikan dalam pengembangan pendidikan Islam di sekolah negeri Jerman adalah kurangnya tenaga pengajar yang memiliki kualifikasi akademik dan pedagogik sesuai standar nasional. Mayoritas guru agama Islam yang mengajar di sekolah negeri berasal dari komunitas Muslim lokal dan sering kali belum memiliki pelatihan formal yang memadai, baik dalam studi Islam akademik maupun

dalam metodologi pengajaran yang sesuai konteks pendidikan Jerman (Schiffauer, 2013). Kondisi ini mengakibatkan ketidakterpaduan antara isi materi, metode penyampaian, dan nilai-nilai pendidikan yang seharusnya mendukung integrasi sosial dan nasionalisme inklusif.

Selain itu, minimnya standar nasional yang baku untuk pendidikan Islam menjadi kendala utama. Berbeda dengan pendidikan agama Kristen dan Katolik yang telah lama memiliki kurikulum terstruktur dan kerangka kerja pedagogik yang jelas, pendidikan Islam masih dalam tahap perkembangan dan eksperimentasi di banyak Bundesländer. Hal ini menyebabkan variasi yang signifikan antar negara bagian dalam hal kurikulum, materi ajar, dan prosedur sertifikasi guru (Rohe, 2021).

Selain faktor struktural, perbedaan pandangan di dalam komunitas Muslim juga memperumit upaya standarisasi pendidikan Islam. Kelompok konservatif yang berafiliasi dengan mazhab tradisional seperti Hanafi maupun Salafi menuntut agar ajaran Islam diajarkan secara otentik sesuai tradisi asal, sementara pemerintah Jerman mendorong integrasi nilai-nilai universal seperti toleransi, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia ke dalam kurikulum (Karakaşoğlu & Mecheril, 2018). Ketegangan ini kerap muncul terutama saat pemerintah memasukkan topik sensitif seperti hubungan Islam dengan demokrasi dan HAM, yang kadang membuat organisasi-organisasi besar seperti DITIB atau Milli Görüş menarik diri dari forum pengembangan kurikulum karena merasa tidak diikutsertakan secara proporsional atau menganggap kurikulum terlalu sekuler (Kiefer & Kühn, 2019).

Selain itu, ketiadaan otoritas keagamaan pusat dalam Islam di Jerman memperparah fragmentasi ini. Berbeda dengan gereja Katolik yang memiliki hierarki tunggal dan sistem kepemimpinan yang terpusat, komunitas Muslim di Jerman sangat terpecah berdasarkan etnis, bahasa, dan orientasi ideologis. Fragmentasi ini menyulitkan pembentukan satu suara representatif dalam proses pembuatan keputusan terkait kurikulum (Spielhaus, 2017).

Menghadapi tantangan ini, beberapa universitas seperti Universitas Osnabrück dan Tübingen telah menginisiasi program pelatihan guru pendidikan Islam yang mengintegrasikan studi Islam akademik dengan pedagogi modern dan konteks sosial-politik Jerman. Program ini dirancang untuk menghasilkan guru yang tidak hanya kuat secara teologis, tetapi juga mampu mengajar secara efektif di sekolah negeri yang multikultural dan pluralistik (El-Menouar, 2016). Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat profesionalisme guru, yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan Islam yang inklusif dan mendukung pembangunan nasionalisme Muslim yang harmonis dengan identitas kewarganegaraan Jerman.

Kebijakan Reformasi Kurikulum PAI di Jerman

Reformasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jerman merupakan bagian dari dinamika pendidikan yang khas dalam sistem federal negara tersebut. Sesuai dengan prinsip federalisme Jerman, urusan pendidikan berada di bawah kewenangan masing-masing negara bagian atau Bundesländer (Rohe, 2021). Artinya, tidak terdapat kebijakan pendidikan agama yang bersifat nasional dan seragam. Oleh karena itu, setiap negara bagian memiliki otonomi untuk merumuskan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam, sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokalnya.

Keberhasilan reformasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jerman, khususnya di negara bagian Nordrhein-Westfalen (NRW), tidak terlepas dari peran strategis guru sebagai

ujung tombak implementasi kurikulum. Oleh karena itu, reformasi tidak hanya terbatas pada penyusunan materi ajar, tetapi juga mencakup pembentukan sistem pendidikan dan sertifikasi guru agama Islam yang profesional, terstandar, dan kontekstual dengan masyarakat Jerman yang plural dan demokratis.

Sejak diperkenalkannya pendidikan Islam sebagai bagian dari kurikulum reguler di sekolah negeri pada tahun 2012, NRW menetapkan bahwa seluruh guru pendidikan Islam harus memperoleh pendidikan formal melalui program studi keislaman di universitas negeri, seperti Universitas Münster dan Universitas Paderborn. Program pendidikan ini didesain secara interdisipliner dan berbasis akademik—mencakup teologi Islam, didaktika agama, pedagogi interkultural, serta studi tentang sistem hukum, masyarakat, dan konstitusi Jerman (Kiefer & Kühn, 2019).

Salah satu ciri khas dari pelatihan ini adalah pengawasan ketat oleh tim multidisipliner yang terdiri dari teolog Muslim, pedagog profesional, dan pakar hukum negara. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dalam memastikan bahwa para guru tidak hanya kompeten dalam menyampaikan ajaran agama, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai yang mendukung integrasi sosial, demokrasi, dan kehidupan berbangsa (Karakaşoğlu & Mecheril, 2018).

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa dalam literatur yang tersedia, belum ditemukan bukti eksplisit bahwa program sertifikasi guru secara langsung memasukkan materi “pembangunan nasionalisme Muslim” sebagai tujuan pembelajaran formal. Meskipun demikian, sejumlah studi menunjukkan bahwa substansi kurikulum dan pelatihan guru mencakup nilai-nilai yang mendukung konstruksi nasionalisme inklusif, seperti penghormatan terhadap konstitusi, keterbukaan terhadap pluralisme agama, dan kesadaran berwarga negara dalam masyarakat demokratis (Rohe, 2021; Schiffauer, 2013).

Dengan demikian, meskipun secara eksplisit istilah “nasionalisme” tidak disebutkan dalam modul pelatihan, pendekatan pedagogis yang diajarkan kepada calon guru pendidikan Islam diarahkan untuk mendukung visi pembentukan warga Muslim Jerman yang inklusif, demokratis, dan berorientasi pada nilai-nilai konstitusional. Hal ini selaras dengan arah reformasi kurikulum yang menekankan pentingnya pendidikan agama sebagai sarana integrasi, bukan segregasi.

Lebih lanjut, untuk memastikan bahwa visi ini benar-benar tercapai dalam praktik, dibutuhkan penelitian lebih mendalam terhadap isi kurikulum pelatihan guru, termasuk observasi langsung terhadap materi pengajaran dan wawancara dengan pengajar dan mahasiswa program studi keislaman di universitas. Penelitian semacam ini penting untuk menilai sejauh mana dimensi kebangsaan dan nasionalisme inklusif telah diinternalisasikan dalam proses pendidikan guru PAI di Jerman

Dalam satu dekade terakhir, beberapa negara bagian yang memiliki populasi Muslim signifikan, seperti Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen, dan Bayern, telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan formal. Upaya ini termasuk pengembangan kurikulum resmi, pelatihan guru agama Islam, dan pendirian program studi keislaman di universitas-universitas negeri untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi akademik dan pedagogis (Kiefer & Kühn, 2019).

Motivasi utama dari reformasi ini tidak hanya untuk memenuhi hak-hak pendidikan agama bagi komunitas Muslim, tetapi juga merupakan bagian dari strategi integrasi sosial. Pemerintah Jerman menyadari pentingnya menyediakan ruang bagi ekspresi religius dalam sistem pendidikan publik, namun dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak

asasi manusia, dan pluralisme (Karakasoğlu & Mecheril, 2018). Pendidikan Islam dalam konteks ini diarahkan untuk menciptakan kohesi sosial, mengurangi risiko eksklusif, dan mencegah radikalisme, melalui pendekatan kurikulum yang inklusif, kontekstual, dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusional negara.

Penting dicatat bahwa proses reformasi ini tidak bebas dari tantangan. Salah satu isu utama adalah menemukan titik temu antara ajaran Islam yang diajarkan dan nilai-nilai kebangsaan Jerman, terutama dalam hal demokrasi, kesetaraan gender, dan kebebasan beragama. Karena itu, keterlibatan para akademisi Muslim, organisasi Islam, serta lembaga pendidikan tinggi dalam perumusan kurikulum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan Islam yang dikembangkan tidak hanya otentik secara teologis, tetapi juga relevan secara sosial dan politis (Schiffauer, 2013).

Dengan demikian, kebijakan reformasi kurikulum PAI di Jerman merupakan proyek pendidikan dan integrasi yang kompleks, yang mencerminkan upaya negara dalam menyeimbangkan antara pengakuan terhadap keragaman agama dengan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan. Uraian umum ini menjadi dasar penting untuk masuk ke dalam pembahasan lebih khusus mengenai bagaimana nilai-nilai Islam yang inklusif seperti toleransi, keadilan, dan kebersamaan diintegrasikan secara nyata dalam kurikulum dan pembelajaran.

Negara bagian Nordrhein-Westfalen (NRW) menjadi pelopor dalam pengembangan pendidikan Islam berbasis negara sejak tahun 2012. Pemerintah NRW membentuk *Kommission für den islamischen Religionsunterricht*, sebuah komisi yang terdiri dari perwakilan organisasi Islam seperti DITIB, akademisi Muslim, serta pejabat pendidikan dari negara bagian. Tujuannya adalah untuk menyusun kurikulum yang seimbang antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip dasar negara demokratis seperti kebebasan, kesetaraan, dan toleransi (Kiefer & Kühn, 2019; Karakasoglu & Mecheril, 2018). Langkah ini menunjukkan upaya serius pemerintah negara bagian dalam menjadikan pendidikan agama Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan publik yang berorientasi pada integrasi sosial dan kohesi nasional.

Demikian pula, negara bagian Niedersachsen menginisiasi program serupa dengan membentuk badan penasihat kurikulum Islam (*Beirat für Islamischen Religionsunterricht*), yang mencakup berbagai aktor dari kalangan Muslim dan lembaga pendidikan tinggi. Salah satu pencapaian penting di Niedersachsen adalah kemitraan dengan Universitas Osnabrück, yang telah menjadi pusat pelatihan guru agama Islam. Melalui kerja sama ini, kurikulum tidak hanya disusun berdasarkan teks-teks keislaman klasik, tetapi juga dikembangkan melalui pendekatan pedagogik modern yang mempertimbangkan realitas sosial Muslim di Jerman (Rohe, 2021; Schiffauer, 2013).

Upaya reformasi ini menandai pergeseran paradigma dari pendidikan Islam yang bersifat komunitarian menuju pendekatan yang lebih institusional dan inklusif. Pemerintah negara bagian tidak lagi memandang pendidikan Islam sebagai urusan eksklusif komunitas Muslim, melainkan sebagai bagian dari pendidikan publik yang bertujuan membentuk warga negara yang kritis, demokratis, dan toleran (Kiefer & Kühn, 2019). Hal ini sejalan dengan visi pendidikan nasional Jerman yang menempatkan sekolah sebagai ruang pembentukan identitas kebangsaan dalam konteks masyarakat multikultural.

Namun demikian, proses ini tidak lepas dari tantangan. Beberapa organisasi Islam menyuarakan kekhawatiran atas dominasi negara dalam menentukan isi kurikulum. Mereka menganggap intervensi negara dapat berpotensi menghilangkan otentisitas ajaran Islam jika tidak diimbangi dengan representasi teologis yang sah (Karakasoglu & Mecheril, 2018). Oleh karena itu, keterlibatan aktif para akademisi Muslim dalam proses reformasi menjadi sangat

penting untuk menjaga legitimasi kurikulum di mata komunitas Muslim sendiri dan memastikan adanya keseimbangan antara kontrol negara dan otoritas keagamaan.

Reformasi ini, pada akhirnya, membuka ruang baru bagi terbentuknya generasi Muslim Jerman yang tidak hanya memiliki fondasi keislaman yang kuat, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Ini adalah bentuk nasionalisme inklusif yang mempertemukan identitas religius dengan loyalitas terhadap negara, sehingga memungkinkan komunitas Muslim menjadi bagian integral dari masyarakat Jerman modern tanpa kehilangan jati dirinya (Schiffauer, 2013; Rohe, 2021).

Reformasi Kurikulum PAI dalam Membangun Nasionalisme Muslim

Reformasi kurikulum pendidikan Islam di Jerman tidak semata-mata bertujuan mengakomodasi kebutuhan spiritual umat Muslim, tetapi juga merupakan bagian dari strategi negara dalam membangun masyarakat multikultural yang kohesif dan demokratis (Rohe, 2021). Pendidikan agama, termasuk pendidikan Islam, dipandang sebagai sarana integrasi sosial, sekaligus sebagai wahana pembentukan identitas kewarganegaraan yang inklusif di tengah keberagaman budaya dan agama.

Salah satu pendekatan penting dalam reformasi ini adalah penekanan pada nilai-nilai universal Islam yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kebangsaan. Nilai-nilai seperti keadilan ('adl), toleransi (tasamuh), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah) yang diajarkan dalam Islam memiliki titik temu yang kuat dengan nilai-nilai kewarganegaraan modern (Karakasoglu & Mecheril, 2018). Kurikulum pendidikan Islam di beberapa negara bagian, seperti NRW dan Niedersachsen, telah memasukkan nilai-nilai ini dalam desain pembelajarannya melalui pendekatan pedagogis yang kontekstual dan transformatif (Kiefer & Kühn, 2019).

Dengan menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pilar dalam kurikulum, proses pembelajaran agama tidak hanya diarahkan untuk membentuk individu yang taat secara religius, tetapi juga warga negara yang bertanggung jawab dan terlibat aktif dalam kehidupan sosial di Jerman. Pendidikan Islam yang mengusung pendekatan inklusif ini membantu memperkuat rasa kebangsaan (nationales Zugehörigkeitsgefühl) di kalangan pelajar Muslim tanpa mengorbankan identitas keagamaan mereka (Schiffauer, 2013).

Dalam konteks integrasi ini, muncul konsep penting yang dikenal sebagai "loyalitas ganda" (doppelte Loyalität)—yakni gagasan bahwa seseorang dapat menjadi Muslim yang beriman sekaligus warga negara Jerman yang setia dan aktif dalam kehidupan demokratis. Konsep ini merupakan koreksi terhadap dikotomi identitas yang selama ini menempatkan keislaman dan kewarganegaraan Barat dalam posisi antagonistik (Spielhaus, 2017). Padahal, ajaran Islam sendiri mendukung keterlibatan sosial dan penghormatan terhadap hukum negara, sebagaimana tercermin dalam prinsip-prinsip seperti 'aqd al-aman (perjanjian damai) dan ta'ah li al-wulat (ketaatan kepada otoritas pemerintahan yang sah).

Dengan pemahaman semacam ini, loyalitas terhadap negara bukanlah bentuk kompromi atau pengkhianatan terhadap iman, melainkan ekspresi dari etika Islam yang mengajarkan tanggung jawab sosial dan perdamaian (Rohe, 2021). Di sinilah letak pentingnya pendidikan Islam sebagai medium pembentukan nasionalisme inklusif—yakni nasionalisme yang tidak menghapus identitas religius, tetapi justru menjadikannya dasar untuk membangun identitas kewarganegaraan yang etis dan demokratis.

Konsep loyalitas ganda ini menjadi semakin relevan di tengah tantangan kontemporer seperti Islamofobia, eksklusifitas sosial, dan radikalisme. Pelajar Muslim yang memperoleh pemahaman agama secara sehat melalui pendidikan formal akan lebih siap mengartikulasikan identitas mereka secara konstruktif, menjembatani perbedaan budaya, serta menolak ideologi

ekstremis yang memisahkan mereka dari masyarakat luas (Schiffauer, 2013; El-Menouar, 2016). Oleh karena itu, pendidikan Islam bukan hanya sebagai sarana spiritual, tetapi juga sebagai strategi kebangsaan, yang mampu membentuk identitas Muslim Jerman yang utuh dan harmonis antara keimanan dan kebangsaan.

Studi Kasus: Kurikulum Pendidikan Islam di Nordrhein-Westfalen

Reformasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jerman berlangsung dalam kerangka sistem federal, di mana masing-masing negara bagian (*Bundesländer*) memiliki kewenangan otonom dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan agama (Rohe, 2021). Hal ini menyebabkan tidak adanya kurikulum PAI yang bersifat seragam secara nasional. Sebaliknya, setiap negara bagian mengembangkan pendekatannya masing-masing, disesuaikan dengan konteks lokal, komposisi penduduk Muslim, serta dinamika sosial dan politik di wilayah tersebut.

Negara bagian Nordrhein-Westfalen (NRW) merupakan salah satu pelopor dalam mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem sekolah negeri di Jerman. Inisiatif ini dilandasi oleh tingginya konsentrasi populasi Muslim, khususnya dari latar belakang migran Turki, Arab, dan Balkan, yang mendorong kebutuhan akan pengakuan identitas religius dalam ruang publik pendidikan (Kiefer & Kühn, 2019). Sejak awal 2000-an, NRW telah merintis model pendidikan Islam berbasis negara dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip konstitusional Jerman, khususnya terkait netralitas negara dan kebebasan beragama.

Keberhasilan NRW dalam merancang kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) mencerminkan pendekatan kolaboratif antara negara bagian, akademisi Muslim, dan organisasi Islam seperti DITIB dan VIKZ. Pemerintah NRW berperan bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dialog multistakeholder. Hasilnya adalah kurikulum yang tidak semata-mata berisi ajaran teologis seperti akidah, ibadah, dan sejarah Islam, tetapi juga memuat nilai-nilai etika Islam yang kompatibel dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme (Karakaşoğlu & Mecheril, 2018).

Pada tahun 2012, NRW secara resmi menjadikan mata pelajaran Islam bagian dari kurikulum reguler di sekolah dasar dan menengah negeri, menjadikannya model percontohan bagi negara bagian lain (Schiffauer, 2013). Untuk menunjang pelaksanaan kurikulum, NRW mendirikan program studi pendidikan Islam di universitas negeri, seperti di Universitas Münster dan Universitas Paderborn, yang bertugas melatih calon guru agama Islam dengan pendekatan akademik dan pedagogi modern. Guru dilatih tidak hanya dalam ilmu-ilmu keislaman klasik, tetapi juga didaktika agama, serta pemahaman terhadap sosiologi keberagaman dan hukum negara.

Langkah penting lainnya adalah pembentukan *Beirat für den islamischen Religionsunterricht* (Komisi Penasihat Pendidikan Islam), yang terdiri dari perwakilan organisasi Islam, akademisi, dan pejabat negara bagian. Komisi ini memberikan masukan terhadap isi kurikulum serta mengawasi proses pelatihan guru, dengan mekanisme checks and balances yang mencegah dominasi sepihak, baik dari negara maupun komunitas Islam. Hal ini mengatasi persoalan representasi dan legitimasi yang sebelumnya kerap menjadi sumber ketegangan (Rohe, 2021).

Kurikulum yang dikembangkan di NRW secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai dasar konstitusi Jerman—seperti demokrasi, kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap hukum—dalam kerangka teologi Islam. Hal ini menjadi dasar bagi pendekatan nasionalisme inklusif, yaitu penguatan identitas keislaman yang tidak bertentangan, melainkan berkoeksistensi secara harmonis dengan identitas kewarganegaraan Jerman. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak lagi diposisikan sebagai ruang privat yang

terisolasi, tetapi sebagai bagian dari pendidikan publik yang membentuk warga negara Muslim yang demokratis dan toleran (Spielhaus, 2017).

Para guru agama Islam hasil pelatihan universitas juga diharapkan menjadi agen integrasi sosial, yang mampu menyampaikan ajaran Islam secara kontekstual kepada pelajar Muslim yang hidup di tengah masyarakat multikultural. Mereka bukan hanya pengajar doktrin, tetapi juga jembatan antara nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai demokrasi, serta model integrasi yang aktif dan konstruktif (El-Menouar, 2016).

Secara keseluruhan, pendekatan NRW menandai transformasi penting dalam kebijakan pendidikan Islam di Jerman, yakni dari model yang komunitarian dan partikularistik menjadi model yang institusional, inklusif, dan sejalan dengan visi kewarganegaraan demokratis. Keberhasilan NRW menjadi rujukan bagi negara bagian lain, sekaligus bukti bahwa pendidikan Islam dapat berperan strategis dalam membentuk nasionalisme Muslim yang inklusif dan berakar pada konstitusi negara.

Reformasi Kurikulum PAI dalam Membangun Nasionalisme Muslim

A. Integrasi Nilai-nilai Islam Inklusif dalam Kurikulum

Reformasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jerman semakin menitikberatkan pada integrasi nilai-nilai Islam yang inklusif, seperti keadilan ('adl), toleransi (tasamuh), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah), yang secara eksplisit diselaraskan dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme yang dianut dalam masyarakat Jerman (Karakasoglu & Mecheril, 2018). Pendekatan inklusif ini tidak hanya bertujuan untuk mengajarkan aspek-aspek ritual dan dogma keislaman semata, tetapi juga membangun pemahaman yang kontekstual mengenai bagaimana ajaran Islam dapat berperan dalam masyarakat multikultural dan demokratis (Schiffauer, 2013).

Nilai keadilan dalam Islam, misalnya, menjadi fondasi untuk mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak individu dan keadilan sosial, yang sejalan dengan prinsip konstitusi Jerman yang menekankan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia (Kiefer & Kühn, 2019). Selain itu, toleransi sebagai nilai sentral dalam kurikulum PAI membantu memupuk sikap saling menghormati antarumat beragama dan budaya yang beragam, yang sangat penting dalam konteks masyarakat Jerman yang pluralistik (Karakasoglu & Mecheril, 2018).

Tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam kurikulum juga menekankan peran aktif pelajar Muslim sebagai warga negara yang peduli dan terlibat dalam kehidupan sosial-politik, bukan hanya sebagai individu yang taat secara religius, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas yang lebih luas (Schiffauer, 2013). Dengan demikian, pendidikan Islam yang direformasi ini memfasilitasi pembentukan identitas Muslim Jerman yang harmonis, di mana keimanan dan loyalitas kebangsaan tidak saling bertentangan, melainkan saling memperkuat (Karakasoglu & Mecheril, 2018).

Penekanan pada nilai-nilai inklusif ini juga berfungsi sebagai strategi negara dalam membangun integrasi yang harmonis dan mencegah eksklusi sosial atau radikalisasi (Kiefer & Kühn, 2019). Melalui pendidikan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dan pluralisme dalam kerangka keislaman yang moderat, kurikulum PAI berperan sebagai sarana efektif untuk membangun nasionalisme Muslim yang inklusif di Jerman.

B. Integrasi Nilai-nilai Kebangsaan dan Demokrasi

Integrasi nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jerman menjadi langkah strategis dalam membangun

nasionalisme inklusif di kalangan pelajar Muslim. Kurikulum yang direformasi secara eksplisit memasukkan prinsip-prinsip dasar konstitusi Jerman, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan toleransi beragama (Karakasoğlu & Mecheril, 2018). Dengan memasukkan nilai-nilai ini, pendidikan Islam tidak lagi berdiri sendiri sebagai ranah keagamaan semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari pendidikan kewarganegaraan yang membentuk sikap kritis, demokratis, dan inklusif.

Penanaman nilai-nilai tersebut bertujuan mengatasi potensi konflik identitas yang selama ini kerap muncul, yaitu antara identitas keislaman dan kewarganegaraan Jerman. Konsep nasionalisme inklusif yang diusung oleh kurikulum ini memungkinkan pelajar Muslim untuk memandang dirinya sebagai bagian yang sah dan aktif dalam masyarakat demokratis Jerman, tanpa harus mengorbankan nilai-nilai keagamaan mereka (Schiffauer, 2013). Misalnya, penekanan pada kesetaraan gender mengajarkan pelajar untuk memahami dan menghormati peran perempuan dalam masyarakat, yang juga sesuai dengan interpretasi Islam modern yang mendukung keadilan dan penghormatan terhadap hak perempuan (Kiefer & Kühn, 2019).

Toleransi beragama yang diajarkan dalam kurikulum juga menjadi pijakan penting bagi pelajar untuk menerima keberagaman keyakinan dan menghormati hak beragama sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat yang demokratis (Karakasoğlu & Mecheril, 2018). Dengan demikian, kurikulum PAI yang mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi berkontribusi pada terciptanya warga Muslim yang tidak hanya taat secara agama tetapi juga loyal dan berperan aktif dalam kehidupan sosial-politik di Jerman.

Melalui pendekatan ini, reformasi kurikulum PAI berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial dan membangun identitas nasional yang inklusif, yang mampu mengakomodasi keberagaman tanpa menghilangkan identitas keislaman para pelajarnya (Schiffauer, 2013).

C. Penguatan Kompetensi Guru sebagai Agen Integrasi

Penguatan kompetensi guru agama Islam menjadi aspek krusial dalam reformasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jerman, karena guru berperan sebagai agen utama dalam menyampaikan nilai-nilai inklusif dan membangun integrasi sosial (Schiffauer, 2013). Program pelatihan guru di negara bagian seperti Nordrhein-Westfalen (NRW) dan Niedersachsen tidak hanya menitikberatkan pada penguasaan materi keislaman secara akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan pedagogik yang sesuai dengan konteks sekolah negeri Jerman (Kiefer & Kühn, 2019).

Pelatihan ini meliputi penguasaan didaktika agama yang modern, serta pembekalan sensitivitas sosial dan budaya, agar guru mampu memahami realitas hidup pelajar Muslim yang tumbuh dalam masyarakat pluralistik (Karakasoğlu & Mecheril, 2018). Pendekatan ini bertujuan agar guru tidak hanya menjadi pengajar ajaran agama semata, tetapi juga fasilitator yang mampu menjembatani identitas keagamaan dan kewarganegaraan, sekaligus menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan nasionalisme inklusif.

Selain itu, pendidikan calon guru diawasi oleh tim multidisipliner yang melibatkan teolog Muslim, ahli pedagogi, dan pakar hukum negara, memastikan bahwa kurikulum dan metode pengajaran yang diterapkan sesuai dengan kerangka hukum dan sosial Jerman (Schiffauer, 2013). Dengan demikian, guru yang kompeten secara teologis dan pedagogis menjadi ujung tombak pelaksanaan kurikulum yang tidak hanya

menguatkan identitas keislaman, tetapi juga memperkuat rasa kebangsaan dan integrasi sosial di kalangan pelajar Muslim.

Keberhasilan penguatan kompetensi guru ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pendidikan Islam yang moderat, inklusif, dan berkontribusi pada pembentukan nasionalisme Muslim yang harmonis dengan nilai-nilai demokrasi di Jerman (Kiefer & Kühn, 2019).

D. Tantangan dan Strategi Implementasi Kurikulum

Pengembangan dan implementasi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Jerman menghadapi berbagai tantangan signifikan yang berkaitan dengan keragaman internal komunitas Muslim dan kompleksitas sistem federalisme pendidikan di negara ini (Karakışoğlu & Mecheril, 2018). Salah satu masalah utama adalah fragmentasi komunitas Muslim yang terdiri dari berbagai latar belakang etnis, bahasa, dan afiliasi keagamaan, seperti Turki, Arab, Bosnia, serta kelompok konservatif dan moderat (Schiffauer, 2013). Fragmentasi ini menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan tentang isi kurikulum yang dapat diterima secara luas oleh seluruh komunitas.

Selain itu, adanya variasi standar kurikulum dan sertifikasi guru antar negara bagian (Bundesländer) menimbulkan disparitas dalam kualitas pendidikan Islam yang diajarkan. Beberapa negara bagian lebih maju dalam integrasi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia dalam kurikulum, sementara yang lain masih dalam tahap awal atau menghadapi resistensi dari kelompok konservatif (Kiefer & Kühn, 2019).

Dinamika antara pemerintah dan kelompok konservatif juga menjadi tantangan tersendiri. Kelompok konservatif seringkali menolak intervensi negara dalam penyusunan kurikulum, karena dianggap dapat menghilangkan otentisitas ajaran Islam (Karakışoğlu & Mecheril, 2018). Hal ini berpotensi menimbulkan konflik representasi dan legitimasi, yang jika tidak diatasi dapat menghambat proses integrasi sosial melalui pendidikan.

Strategi utama yang diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum. Negara bagian seperti Nordrhein-Westfalen (NRW) membentuk komisi penasihat yang melibatkan berbagai aktor penting, mulai dari perwakilan organisasi Islam, akademisi Muslim, hingga pejabat pemerintah (Schiffauer, 2013). Model ini memberikan ruang dialog yang konstruktif, memastikan kurikulum yang dihasilkan memiliki legitimasi dari berbagai pihak dan diterima oleh komunitas Muslim.

Pendekatan inklusif dan transparan ini tidak hanya memperkuat legitimasi kurikulum, tetapi juga mendorong akseptasi yang lebih luas di kalangan masyarakat Muslim Jerman. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berfungsi sebagai alat efektif dalam membangun nasionalisme Muslim yang inklusif dan integratif, sekaligus memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat multikultural Jerman (Kiefer & Kühn, 2019).

E. Implikasi Pendidikan PAI di Jerman

Konstitusi federal Jerman telah memberikan kewenangan pengaturan sistem pendidikan kepada negara bagian. Implikasi dari kebijakan ini adalah adanya otoritas penuh dari pemerintahan negara bagian untuk menentukan kebijakan sistem pendidikan (Saifullah, 2014).

Pengaturan ini meliputi penetapan tujuan pendidikan, struktur, isi pengajaran dan prosedur dalam sistem daerah mereka masing-masing. Implikasi dari kebijakan ini

adalah adanya otoritas penuh dari pemerintahan negara bagian untuk menentukan kebijakan sistem pendidikan (Syaza Sahira, dkk, 2025).

Agama dipahami sebagai sebuah sistem keyakinan yang dianut, yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan baik secara individu, berkelompok maupun bermasyarakat sebagai interpretasi dan respon terhadap kondisi sosial yang dihadapi. Selain itu, agama merupakan sebuah refleksi imani yang terimplikasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah perilaku beragama (Nuryanto dan Yunita Wildaniati, 2024).

Menurut Yusufhadi Miarso bahwa Perubahan itu dapat dibedakan pada empat lapis sistem yang saling berkaitan yaitu: 1. perubahan pada pengalaman belajar 2. pada sistem belajar-pembelajaran yang memungkinkan terlaksananya pengalaman belajar yang diinginkan, seperti misalnya dalam sekolah. 3. perubahan pada pengalaman sistem pembelajaran, 4. perubahan pada sistem perundangan yang mengatur dan menjamin berlangsungnya keseluruhan sistem pendidikan secara nasional (Afri Eki Rizal, dkk, 2023).

KESIMPULAN

Reformasi kurikulum pendidikan Islam di Jerman bukan hanya sekadar upaya penyesuaian materi ajar, melainkan merupakan langkah strategis yang fundamental dalam membangun nasionalisme Muslim yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman seperti keadilan, toleransi, dan tanggung jawab sosial dengan nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi Jerman, memungkinkan umat Islam untuk merajut identitas ganda yang harmonis sebagai warga negara sekaligus penganut agama yang taat. Hal ini menepis paradigma lama yang memandang Islam dan kewarganegaraan sebagai dua entitas yang bertentangan, dan menggantikannya dengan model nasionalisme inklusif yang mampu memperkuat kohesi sosial di tengah keragaman budaya dan agama.

Lebih jauh, pendidikan Islam yang progresif dan terintegrasi ini berperan sebagai pilar penting dalam menciptakan generasi Muslim yang tidak hanya memahami ajaran agamanya secara mendalam, tetapi juga memiliki kesadaran kritis terhadap nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme. Dengan demikian, pendidikan Islam turut mendorong partisipasi aktif dan konstruktif umat Muslim dalam kehidupan sosial-politik Jerman, sekaligus menjaga keutuhan dan stabilitas negara sebagai bangsa multikultural.

Keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada penguatan kompetensi guru sebagai agen integrasi yang mampu menyampaikan materi secara kontekstual dan inklusif, serta pada strategi kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan komunitas Muslim untuk mengatasi tantangan fragmentasi dan perbedaan pandangan internal. Oleh karena itu, reformasi kurikulum pendidikan Islam di Jerman bukan hanya proyek pendidikan, melainkan sebuah instrumen kebijakan sosial-politik yang vital dalam membangun masyarakat yang demokratis, toleran, dan bersatu, sekaligus menjaga identitas religius tanpa harus mengorbankan loyalitas kebangsaan.

DAFTAR PUSTAKA

Afri Eki Rizal, dkk, Reformasi Dan Arah Baru Pendidikan Agama Islam Masa Depan, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Volume. 3, Nomor. 3, Tahun 2023.

Bade, K. J. (2003). *Migrasi dalam sejarah Eropa*. Blackwell Publishing.



- Bielefeldt, H. (2013). Pendidikan agama Islam di Jerman: Perkembangan dan tantangan terkini. *British Journal of Religious Education*, 35(3), 239–245.
- Boos-Nünning, U. (2010). Pendidikan dan integrasi remaja Muslim. *Aus Politik und Zeitgeschichte*, 60(34–35), 16–22.
- Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF). (2018). *Peningkatan pendidikan teologi Islam di Jerman*. BMBF.
- Bundesverfassungsgericht. (2003). Keputusan mengenai pendidikan agama Islam. *BVerfGE*, 93, 1.
- Fadel, M. H. (2011). Islam dan kewarganegaraan liberal dalam negara sekuler. *Political Theology*, 12(4), 606–625.
- Khorchide, M. (2012). *Islam adalah kasih sayang: Pokok-pokok ajaran agama modern*. Herder.
- Langenfeld, C. (2016). Studi Islam dan pendidikan guru – Jalan baru dalam sistem pendidikan tinggi Jerman. *Zeitschrift für Pädagogik*, 62(1), 93–108.
- Ministerium für Schule und Bildung NRW. (2021). *Pendidikan agama Islam di NRW: Dasar dan perkembangan*. MSB NRW.
- Nuryanto dan Yunita Wildaniati, Pendidikan Islam Moderat dan Nasionalisme pada Lembaga Pendidikan Islam Berbasis Pesantren di Kota Metro, *JIEL: Journal of Islamic Education and Learning*, Vol.04, No.02. Juli-Desember 2024.
- Özyürek, E. (2014). *Menjadi Jerman, menjadi Muslim*. Princeton University Press.
- Ramadan, T. (2004). *Muslim Barat dan masa depan Islam*. Oxford University Press.
- Saifullah, Konsep Pendidikan Jerman dan Australia (Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia), *JIP-International Multidisciplinary Journal*, Vol. 2, No. 02, Mei 2014.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.
- Syaza Sahira, dkk, Perkembangan Sistem Pendidikan di Jerman, *Bhinneka: Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa*, Volume. 3, Nomor. 1, Tahun 2025.
- Tibi, B. (2009). *Euro-Islam: Solusi untuk konflik peradaban*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Weiß, A. (2018). *Pendidikan Islam di Jerman: Sejarah dan tantangan*. Springer VS.
- Zentrum für Islamische Theologie Münster. (2020). *Laporan mengenai pendidikan guru dalam bidang agama Islam*.